

BAB I

PEBDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan Gunung Merapi telah menyatu dalam budaya masyarakat Yogyakarta. Terdapat sinergi multi dimensi antara Gunung Merapi dengan kehidupan masyarakat Yogyakarta. Perwujudan di atas disimbolisasikan dengan adanya mitos trilogi Gunung Merapi – Keraton Yogyakarta Hadiningkrat – Laut Selatan yang ketiganya merupakan pengkristalan dari sosioekosistem yang telah lama mengakar di masyarakat umum.

Sebagian kalangan masyarakat ilmiah memandang Gunung Merapi sebagai suatu ekosistem yang layak untuk dipertahankan. Kelayakan ini berdasarkan pada argumentasi bahwa ekosistem Gunung Merapi berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan yang melindungi kawasan di bawahnya, dan juga berfungsi melindungi komponen ekosistemnya sendiri, yang unik dan sebagian terancam kepunahan. Berdasarkan pertimbangan inilah Pemerintah Pusat menetapkan ekosistem Gunung Merapi sebagai Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi(Lihat bagian Konsideran SKB: Menhut, MeriLH Nomor 32/2004 tentang Penetapan Kawasan Gunung Merapi saebagai Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi).

Terhadap penetapan Taman Nasional Gunung Merapi tersebut, muncul reaksi keras dari masyarakat sekitar kawasan Gunung Merapi(lihat SKH Kedaulatan Rakyat dan Kompas DIY Jateng secara terus menerus mengekspos

Agustus, September, dan Oktober 2004). Sebagian masyarakat yang merasa mempunyai kesamaan nasib akibat dari kemungkinan ketidakadilan struktural, telah membuat paguyuban-paguyuban, semisal Paguyuban Petani Lereng Merapi. Dengan paguyuban tersebut diharapkan berfungsi sebagai *pressured groups* terhadap kemungkinan ketidakadilan struktural atas pengelolaan kawasan Gunung Merapi.

Secara normatif, apabila suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional, maka tidak memungkinkan masyarakat setempat mengakses sumber daya alam setempat walaupun sekedar untuk kebutuhan pokok. Kondisi demikian itu berbeda jauh dengan waktu sebelumnya yang sebelumnya masyarakat setempat dapat merasakan hak-hak ulayat.

Namun demikian, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Kabupaten Sleman tetap mempunyai harapan bahwa walaupun Kawasan Gunung Merapi dijadikan Taman Nasional, namun masyarakat setempat tetap harus diberikan ruang untuk tetap mengakses dan berpartisipasi dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi.

Kalau melihat jauh ke belakang pada peristiwa-peristiwa konflik antara masyarakat di kawasan Gunung Merapi dengan Pemerintah sebagai akibat dari benturan antara kepentingan struktural dengan kepentingan masyarakat memang sering terjadi. Kasus sengketa sumber air Umbul Wadon, Kasus PDAM, Kasus Perusahaan Air Minum "EVITA" merupakan rentetan konflik. Sangat mungkin di masa yang akan datang akan terjadi akumulasi berbagai konflik sehingga menjadi konflik yang maha dahsyat.

Apabila dikaji secara mendalam begitu banyak permasalahan yang

yang secara nyata kebijakan tersebut membentur secara keras dengan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal, termasuk di dalamnya kepentingan perusahaan yang mendapat legitimasi kebijakan yang berbenturan dengan kepentingan masyarakat lokal. Seringkali terlihat dengan jelas benturan kepentingan tersebut sampai pada dataran kekerasan yang memakan korban harta dan jiwa.

Oleh karena itu menjadi kebutuhan primer untuk mengevaluasi dan mengkritisi berbagai kebijakan dengan mengidentifikasi dampak dan kinerja dari suatu kebijakan dalam pengaruhnya terhadap masyarakat. Rentetan kebijakan yang menetapkan Kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional juga yang sangat terkait dengan munculnya berbagai problem benturan kepentingan menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan argumentasi maupun gambaran fakta tersebut di atas, sangat menarik mengangkat penelitian dengan judul: "PENGARUH PENETAPAN KAWASAN GUNUNG MERAPI SEBAGAI TAMAN NASIONAL TERHADAP HAK-HAK MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut di atas, penelitian ini didasarkan keinginan kuat untuk mengkaji secara mendalam pengaruh penetapan Kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional terhadap hak-hak masyarakat lokal. Mengingat sebelumnya, sudah terdapat hubungan hukum yang erat baik berdasarkan hukum positif seperti hak atas tanah, hak atas

hukum adat seperti hak ulayat, hak mencari kayu bakar, hak merumput. Disamping terdapat hak, menurut hukum adat bahwa masyarakat lokal telah menjalankan kewajiban seperti merawat dan menghijaukan hutan-hutan di kawasan gunung merapi, begitu dengan ritual-ritual yang dilakukan secara reguler secara gotong royong dalam rangka menjaga kelestarian kawasan Gunung Merapi.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penetan Kawasan Gunung Merapi menjadi Taman Nasional terhadap hak-hak masyarakat lokal dengan ditetapkannya kawasan gunung merapi sebagai taman nasional terhadap?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam kebijakan pengelolaan TNGM?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- i. Mengetahui dan mengevaluasi pengaruh kebijakan Penetapan Kawasan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional terhadap hak-hak masyarakat lokal
- ii. Mengetahui pola perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

D. Kontribusi Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan mengenai perencanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan publik yang sangat

substantif yang melekat pada tuntutan kondisi kehidupan masyarakat dan alam sekitar sehingga ilmu pengetahuan tidak semakin menjadi “menara gading”.

2. Bagi Teknik Perencanaan Pembangunan

Penelitian ini juga sangat bermanfaat untuk mengembangkan teknik perencanaan pembangunan yang baik khususnya di tingkat daerah sehingga perencanaan pembangunan mengakomodasi berbagai aspek keseimbangan antara aspek ekologis dan ekonomis